



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 142/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **19:43** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Cecilia Soetanto , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2023 memberi kuasa kepada Yoshua Adhinugraha Mandiraatmadja
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Senin** tanggal **tiga belas** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **13:05** WIB.

**Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 142/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Cecilia Soetanto
Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No APPP : 142/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Surat Kuasa	1	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	Alat Bukti P-1	1	
7	Alat Bukti P-2	1	
8	Alat Bukti P-3	1	
9	Permohonan bertanggal 24 Oktober 2023	13 rangkap	Diterima melalui Biro Umum pada hari kamis, 2 November 2023 Pkl. 14.53 WIB. 1 asli, 12 copy.
10	Salinan KTP an Yoshua Adhinugraha (dinazegelen)	13 rangkap	1 asli (dinazegelen), 12 copy. Belum diberi tanda/kode bukti.
11	Salinan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	13 rangkap	1 asli (dinazegelen), 12 copy. Belum diberi tanda/kode bukti.
12	Salinan Putusan PTUN Jakarta Nomor 150/G/2023/PTUN.JKT tanggal 16 Agustus 2023.	13 rangkap	1 asli (dinazegelen), 12 copy. Belum diberi tanda/kode bukti.
13	Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2023	1 rangkap	Asli
14	DAB P-1 sd P-3	1 rangkap	
15	KTP Kuasa	1 rangkap	

Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.